



DKI Lelang Jabatan Sekda

Lelang jabatan sekda bisa dilakukan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memproses lelang jabatan (*open bidding*) sekretaris daerah (sekda) DKI. Posisi sekda lowong setelah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dengan menggesernya menjadi deputi gubernur bidang kebudayaan dan pariwisata.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Maria Qibtya, Pemprov DKI masih mempersiapkan proses administrasi untuk pengumuman lelang jabatan terbuka sekda. Hal itu lantaran Usus Kuswanto yang ditunjuk menggantikan Marullah statusnya hanya pj sekda. "Masih dalam tahap persiapan. Kalau ada akan diumumkan secara terbuka," kata Maria kepada awak media di Balai Kota DKI, Kamis (8/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, lelang jabatan sekda bisa dilakukan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Ya *gak papa*, jalani saja lelang," kata Taufik.

Dia mengaku, tidak berharap banyak kepada sekda definitif nantinya.

Pasalnya, pemilihan sekda menjadi domain eksekutif dalam membuka proses seleksi atau penunjukan. Meskipun begitu, Taufik berpesan, sekda terpilih nantinya tidak perlu banyak ikut campur persoalan politik praktis. Hal itu mengingat kurang dari dua tahun, pemilihan umum dan pemilihan gubernur DKI bakal digelar.

"Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan sedapat mungkin itu yang profesional," kata Taufik. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI apakah memilih pejabat karier atau dari luar dalam menunjuk sekda. Hanya saja, ia memiliki pandangan, lebih baik agar pemilihan sekda merujuk sosok yang mengetahui seluk beluk Ibu Kota.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai, lelang jabatan pemilihan sekda menjadi wewenang murni eksekutif. Namun, ia menyarankan supaya figur pengganti Usus adalah orang lincah dan mampu membangun koordinasi di lingkungan Pemprov DKI serta komunikasi yang baik ke seluruh pemangku kepentingan. "Kuncinya *kan* di situ, komunikasi dan koordinasi

menjadi hal yang penting agar bisa melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta," kata Gembong.

Menyoal proses pemilihan, Gembong menjelaskan, Pj Gubernur Heru menyerahkan tiga nama untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia memastikan, mereka yang ikut lelang jabatan bisa berasal dari luar pejabat Pemprov DKI. "Tapi bisa juga promosi dari ASN yang ada di Jakarta. Pilihannya tentu eksekutif yang bisa menjawab itu," kata Gembong.

Dia ingin agar proses pemilihan sekda bisa berlangsung cepat. Dengan begitu, sekda terpilih bisa fokus

di satu jabatan saja. "Kalau sekarang seperti rangkap jabatan agak mengganggu kinerja juga. Sekarang pak Usus sementara sekda juga asisten, kalau seperti ini dilakukan terlalu lama tidak akan maksimal membangun koordinasi," ujar Gembong.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Soni Sumarsono, menganggap, proses lelang jabatan sekda merupakan hal wajar dan sudah biasa di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga, hal itu tinggal menjalankan prosedur rutin dalam memilih kandidat sekda untuk diserahkan ke pemerintah pusat.

"Yang penting, sifatnya terbuka kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi, silakan melamar," kata Soni kepada *Republika*.

Berbeda dengan pemilihan pj gubernur yang melibatkan DPRD DKI, kata dia, lelang sekda dimulai dengan proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dari berbagai pihak. DPRD, disebut Soni, tidak akan terlibat sama sekali.

"Karena ini sifatnya *executive review*," kata eks dirjen otonomi daerah Kemendagri itu.

Sebelumnya, Pj Gubernur Heru menerangkan, penentuan sekda definitif bakal ditentukan Presiden Jokowi. Hal itu disebabkan status sekda merupakan pejabat eselon I. "Lelangnya terbuka, saat ini sedang proses untuk pendaftaran," kata Heru. ■ **ed:** erik purnama putra



Komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting agar bisa melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta.